

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Di dalam dunia kerja instansi pemerintahan tentunya dipimpin oleh seorang manajer yang sangat berperan penting yang harus memiliki kinerja yang berkualitas, dalam suatu SKPD yang dikatakan manajer yaitu beberapa kepala bagian yang membidangi satu bidang tertentu. Kinerja dari kepala bagian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukannya. Agar pemerintah yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja manajerial, instansi pemerintah membuat penetapan kinerja manajerial secara berjenjang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu capaian yang baik, melalui penetapan target kinerja manajerial, serta indikator kinerja manajerial yang menggambarkan pencapaiannya baik berupa keberhasilan maupun manfaat.

Secara umum, kinerja diartikan sebagai suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada periode tertentu. Menurut Bastian (2006) dalam Nur Afrida (2013) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.

DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam rapat Rancangan Kebijakan Anggaran (RKA) dan Rancangan rakor sementara perubahan APBD 2014,

menekankan kepada para SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) Pemprov Babel agar lebih meningkatkan kinerjanya. Hal ini dilakukan karena ada beberapa hal yang jadi sorotan dewan, seperti serapan anggaran oleh pihak SKPD yang belum terwujud di Babel belum sampai 50% dan ada beberapa kegiatan yang belum layak dilaksanakan. Kecilnya serapan daerah karena ketidakmampuan kepala SKPD diwilayah Pemprov Babel. Oleh karena itu diharapkan agar Gubernur lebih mengkaji kinerja bawahannya. Disinggung mundurnya beberapa kepala SKPD karena dinilai ketakutan terkait beberapa temuan proyek yang dibidik pihak kejaksaan. Jika SKPD merasa tidak melakukan tindakan yang menyimpang atau bersalah, kenapa mesti takut. (Didit Srigusjaya, 2014)

Bupati Bangka, H Tarmizi Saat menegaskan Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditargetkan minimal 3 program harus berjalan dan sukses setiap tahunnya untuk mengembangkan Kabupaten Bangka. Hal itu ditegaskannya pada saat menyerahkan hadiah lomba ulang tahun kota Sungailiat yang ke 249 di rumah dinas Bupati Bangka. Setiap kepala SKPD di Pemda Bangka harus mempunyai kreatifitas jangan hanya menunggu perintah Bupati dan Wakil Bupati Bangka sehingga setiap persoalan harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi. Tarmizi menambahkan berbagai kegiatan untuk perkembangan Kabupaten Bangka akan terus dilaksanakan, seperti pembangunan jalan yang akan terus dilaksanakan sampai tahun 2020 menggunakan APBN. Dilakukan pengembangan Sungailiat dimana akan disiapkan lahan seluas 350 hektar di Sinar Baru untuk pembangunan infrastuktur perumahan, Pasar, dan lainnya dikarenakan

Kota Sungailiat sudah cukup rapat dan akan dikembangkan di daerah tersebut.
(H. Tarmizi, 2015)

Dalam rangka penyegaran dan memenuhi aturan ASN, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan melakukan lelang Jabatan di 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1 Biro. Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Efendi mengatakan, lelang jabatan ini untuk mencari pejabat yang benar-benar bisa bekerja. Lelang ini terbuka bagi seluruh pejabat yang ada di 7 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bangka Belitung. Menurut Gubernur, yang terpenting harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bangka Belitung. 9 dinas dan 1 biro yang akan di lelang jabatan diantaranya Dinas Perhubungan, Sosial, Kelautan Perikanan, Kesbangpol, Rumah Sakit Jiwa dan Biro hukum. Dia berharap melalui lelang jabatan ini, pejabat yang terpilih dapat membantu Pemerintah meningkatkan serapan anggaran yang selama ini banyak tidak terserap. Sementara Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung mengaku menyambut baik adanya pergantian pejabat di 9 SKPD. Didit berharap, pejabat yang terpilih nantinya dapat menjalankan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan jangan mensia-siakan anggaran yang sudah mereka perjuangkan.
(Rustam Effendi, 2015)

Berdasarkan temuan dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya tingkat kinerja SKPD Pemprov Babel sehingga menyebabkan sering terjadi permasalahan dalam anggarannya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi kualitas kinerja manajerialnya.

Kinerja manajerial adalah sebagai hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan di setiap SKPD. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Sedarmayanti 2004) dalam Nur Afrida (2013).

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas (Arens, dkk 2008). Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 menyatakan bahwa apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja manajerial. Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Coso report 2008).

Menurut Mulyadi (2002) definisi pengendalian intern yaitu segala sesuatu yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian intern meliputi : struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (administrasi), budget dan standart pemeriksaan intern dan sebagainya. Menurut PP No.8 tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses yang baik pula, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi.

Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et.al. (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang

tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Afrida (2013) mengenai pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Irine Chintya (2010) mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya tingkat kinerja para SKPD sehingga menyebabkan sering terjadi permasalahan dalam anggarannya.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini beberapa hal yang ingin diketahui jawabannya, seperti yang sudah di singgung dalam latar belakang penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan pertanyaan seperti berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD di Kota Pangkalpinang
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD di Kota Pangkalpinang
3. Bagaimana kinerja manajerial pada SKPD di Kota pangkalpinang
4. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja manajerial secara simultan maupun parsial pada SKPD di Kota Pangkalpinang

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD di Kota Pangkalpinang
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD di Kota Pangkalpinang
3. Untuk mengetahui kinerja manajerial pada SKPD di Kota Pangkalpinang
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

kinerja manajerial secara simultan maupun parsial pada SKPD di Kota Pangkalpinang

1.4 Kegunaan penelitian

Dari dilaksanakannya penelitian ini di harapkan ada beberapa manfaat yang bisa di ambil oleh beberapa pihak. Manfaat atau kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Serta sebagai bahan perbandingan antara teori nyata dalam suatu organisasi yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penyusun

Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah yang telah di identifikasi pada bagian sebelumnya. Selain itu juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pemahaman ilmu dan wawasan mengenai akuntansi pemerintahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah referensi untuk penelitian sehingga memotivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pemerintahan.

3. Bagi instansi pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan pengendalian kinerja manajerial dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi instansi dalam pelaksanaan kinerja manajerial.